BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan perijinan di Indonesia masih banyak terdapat hambatan-hambatan bagi investasi di dalam negeri. Secara umum, terdapat beberapa masalah dalam perijinan ber-usaha di indonesia. Terkait hal ini perizinan di beberapa instansi pemerintahan belum menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hal ini akan memicu masalah-masalah baru, seperti pelayanan parsial dan tidak terintegrasi. Dalam proses perizinan ini masih banyak menemui kendala, sejumlah pelayanan perizinan masih dikatakan lambat dalam menerapkan suatu metode atau sistem itu sendiri. Hal ini disebabkan akibat proses yang terlalu berbelit-belit dan ketidakpastian kapan terbitnya suatu perizinan tersebut.

Dengan adanya kemudahan berusaha dan dorongan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo terkait kebijakan untuk mendorong pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan, maka hal-hal yang perlu dilakukan yaitu dengan cara hambatan-hambatan mengenai perizinan perlu disederhanakan, direformasi dan distandarisasi serta bagaimana dalam melakukan suatu perizinan tersebut tidak membebankan para pelaku usaha itu sendiri. Hal ini telah tercantum dalam peraturan presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha dan peraturan presiden Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan berusaha terintegrasi secara Elektronik. Dengan adanya peraturan presiden ini diharapkan mampu mempermudah terkait dalam mengajukan pelayanan perizinan sehingga tidak perlu proses yang berbelit-belit dalam mengajukan perizinan tersebut.

Banyaknya kegagalan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bermutu, responsif, dapat dipercaya dan memiliki etika pelayanan yang baik disebabkan karena sumber daya manusia itu sendiri, terutama sikap pegawai pemerintah yang berada di lini terdepan dalam memberikan pelayanan. Sikap pegawai ini dinilai sangat berpengaruh terhadap upaya perbaikan dan sertifikasi yang diinginkan suatu organisasi atau instansi. Artinya proses yang terjadi ini

karena adanya perbedaan individu yang berasal dari nilai-nilai dan norma yang ingin dipertahankan dan dikelola oleh individu itu sendiri. Memahami apa yang dipikirkan seorang pegawai dan mengetahui sikap mereka, akan sangat berarti dalam mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai suatu tujuan organsasi.

Melihat dari kondisi diatas untuk dapat mencapai kinerja yang baik diperlukan pengendalian yang efektif dan efisien baik dari segi waktu dan penggunaan sumberdaya yang ada. Pengawasan seperti ini biasa di sebut pengawasan melekat. Fungsi dari pengawasan melekat ini erat pada pejabat pimpinan yang berwenang. Dengan begitu kuatnya pengawasan melekat pada pejabat itu, maka ia wajib menyelenggarakan pengendalian yang dimaksudkan tersebut. Tanpa harus menunggu diperintah lagi, karena pejabat tersebut yang justru harus memerintah demi terwujudnya pengendalian.

Pengawasan itu sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting terlebih-lebih dalam Negara berkembang, karena dalam negara berkembang pembangunan dilakukan sangat pesat sedangkan tenaga atau personil belum siap mental dalam melaksanakan pembangunan tersebut, sehingga mungkin saja terjadi kesalahan-kesalahan, kecurangan-kecurangan dan kelalaian-kelalaian. Dengan demikian perlu dan sangat penting adanya pengawasan guna mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada hakekatnya pengawasan melekat mewajibkan agar setiap atasan langsung mengetahui kegiatan nyata dari aspek serta permasalahan pelaksanaan tugas dalam lingkungan organisasi tersebut untuk selanjutnya bilamana terjadi penyimpangan dapat langsung mengambil langkah-langkah perbaikan dan tindakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 46 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat, dijelaskan bahwa pengawasan melekat merupakan salah satu bentuk pengendalian aparat pemerintah di setiap instansi dan satuan organisasi dalam meningkatkan mutu kinerja di dalam lingkungan tugasnya masing masing agar tujuan instansi atau organisasi dapat

tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan melekat ini dapat terwujud melalui kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian yang dilakukan pimpinan terhadap para bawahannya.

Kantor Dinas penanaman modal, Pelayanan terpadu satu pintu dan Tenaga kerja Bondowoso ini berhubung sebagai instansi pemerintah, memiliki pegawai yang karakteristiknya cukup berbeda-beda. Perbedaan tersebutlah yang mungkin saja dipengaruhi oleh para pegawai dalam hal pengetahuan, sikap, kedisiplinan, keterampilan dan faktor lainnya. Keadaan seperti inilah yang mungkin menimbulkan perbedaan kemampuan para pegawai dalam hal melaksanakan tugasnya. Sehingga tingkat ke-efektivitasan dan efisiensi kerja pegawai akan bervariasi.

Harapan pemerintah kabupaten Bondowoso khususnya kepada instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan melekat terhadap pelayanan perizinan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien terhadap organisasi. Untuk mencapai pemerintah yang baik dalam pemerintahan maka prinsip-prinsip itu sangat penting dilakukan. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip pemerintah yang baik itu maka tiga pilar yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil hendaknya saling menjaga, saling suport dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan.

Melihat kondisi seperti diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah khususnya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja dalam menanggulangi permasalahan dalam memberikan pelayanan perijinan . Berdasarkan Penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi “Pengawasan Melekat Terhadap Pelayanan Perijinan Di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bondowoso.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas,secara umum yang menjadi permasalahan yaitu : Bagaimana pelaksanaan Pengawasan Melekat Terhadap Pelayanan Perijinan di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bondowoso?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Pengawasan Melekat Terhadap Pelayanan Perijinan Di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso dilihat dari unsur-unsur kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan dan keterbukaan

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori – teori yang di peroleh oleh peneliti selama perkuliahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember, khususnya mengenai Pengawasan Melekat Terhadap Pelayanan Perijinan Di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bondowoso.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran agar menjadi masukan dan kritikan terhadap permasalahan dalam Pengawasan Melekat Terhadap Pelayanan Perijinan Di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bondowoso .

1.4.3. Manfaat Bagi Peneliti

Menerapkan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan - hambatan dalam pelaksanaan Pengawasan Melekat Terhadap Pelayanan Perizinan

(Study Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso).